

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan sebab masyarakat yang cerdas dan berkarakter agar dapat memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan dari aspek pembiayaan. Pembiayaan pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan layanan pendidikan di sekolah. Berkenaan dengan pembiayaan pendidikan, beberapa negara memiliki karakteristik dalam mengelola pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang diperlukan (Musah & Aawaar, 2022; Maresova & Kuca, 2019). Musah et al. (2024) menunjukkan bahwa pemerintah di Afrika berupaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan melalui peningkatan anggaran pembiayaan pendidikan. Hal ini juga terjadi di Ghana. Menurut Stenzel et al. (2024) kebijakan Pendidikan gratis yang dilakukan oleh pemerintah Ghana berdampak pada tingkat partisipasi pendidikan peserta didik baik perempuan maupun laki-laki yang masuk kedalam tingkat ekonomi rendah.

Di Indonesia, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, pemerintah membuat kebijakan tentang pendanaan pendidikan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 49 ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini dituangkan dalam beberapa program, salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini bersumber dari APBN yang dimasukkan ke dalam dana alokasi khusus non fisik. Program dana BOS mulai diberlakukan sejak tahun

2005. Kondisi awal diluncurkannya program tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Dengan kata lain, program dana BOS memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: (a) menggratiskan seluruh peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dari biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI); (b) menggratiskan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta; dan (c) meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik sekolah swasta (Dit.PSD, 2010).

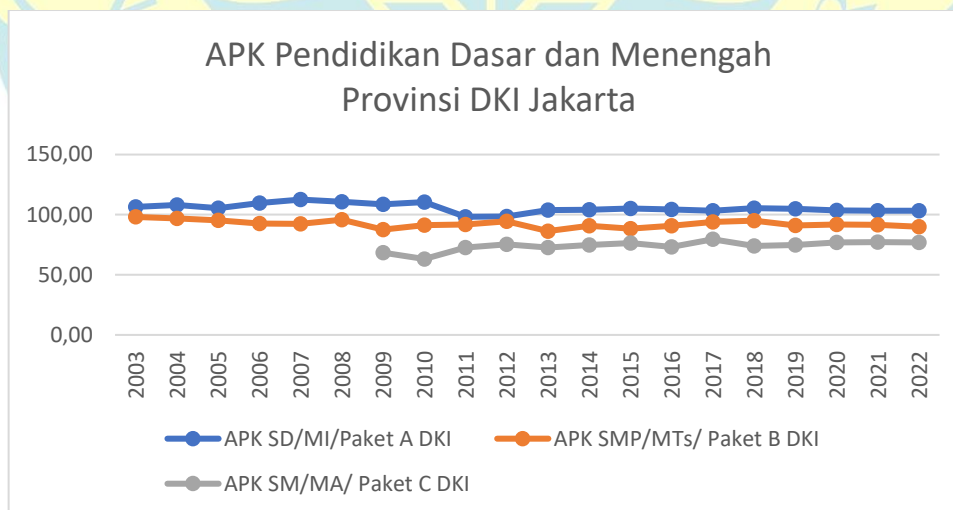
Disisi lain, dasar perhitungan besaran dana BOS reguler yang diberikan tiap sekolah berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dana BOS ini diperuntukkan bagi semua kalangan, baik kalangan ekonomi atas maupun kalangan ekonomi bawah (Suhardi, 2019). Sehingga, tujuan dari program dana BOS tidak hanya fokus terhadap peserta didik dengan tingkat ekonomi rendah tetapi juga semua kalangan. Dana BOS juga memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah (Kemdikbud, 2021). Oleh karena itu, pada tahun 2014, pemerintah membuat program bantuan dana BOS untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dana BOS SMA merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU). PMU merupakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Sehingga, dana BOS SMA diberikan secara langsung kepada SMA negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non-Personalia Sekolah (Direktorat SMA, 2014). Sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Selain itu,

penyelenggaraan PMU melalui program dana BOS bertujuan untuk mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97 % (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2020 (Kemendikbud, 2013).

Menurut Ruftiana dan Hayati (2020) pada jenjang pendidikan menengah dana BOS memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap APK. Hal ini terjadi karena bantuan pemerintah pada satuan pendidikan, akan menurunkan biaya pendidikan yang dibebankan pada masyarakat, dengan demikian akan meningkatkan jumlah permintaan masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan di satuan pendidikan berdampak menaikkan APK (Tsani et al., 2018). Megawati (2020) juga menambahkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan telah meningkatkan peluang partisipasi sekolah pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan kata lain, pemerintah melalui dana BOS memberikan peluang pada peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) presentase APK pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di DKI Jakarta terlihat pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1 Presentase APK Pendidikan Dasar dan Menengah

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan dasar sejak sebelum adanya dana BOS tidak mengalami perubahan yang signifikan, baik pada jenjang SD/MI/ Paket A maupun pada jenjang SMP/MTs/Paket B.

Di tahun 2012 APK SMP/MTs/Paket B mencapai angka sebesar 94,58 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 89,89. Disamping itu, APK pada jenjang SMA/MA/Paket C mengalami penurunan di tahun 2022. Grafik 1.1 menunjukkan bahwa APK jenjang SMA/MA/Paket C memiliki presentase jauh lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar dan SMP/MTs/Paket B. Data tersebut berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Ruftiana dan Hayati (2020).

Berdasarkan Laporan Statistik Pendidikan Provinsi DKI Jakarta BPS (2022) menunjukkan bahwa banyak lulusan jenjang SMP/MTs/Paket B tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh kesulitan biaya, kurangnya minat anak untuk bersekolah dan alasan lainnya. Sehingga, ketercapaian yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya dana BOS SMA di tahun 2014 agar dapat mencapai angka 97% di tahun 2022 masih jauh dari harapan. Selain itu, data APK yang disampaikan oleh BPS tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dana bantuan pemerintah dapat meningkatkan partisipasi anak untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang berikutnya (Romlah et al., 2023; Megawati, 2020; Rutfiana & Hayati, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis melalui evaluasi program dana BOS yang diselenggarakan pemerintah. Hal ini dikarenakan hasil studi Sunardi (2017) menuturkan bahwa adanya program dana BOS diharapkan banyak anak-anak Indonesia usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan menengah dan tidak ada siswa yang putus sekolah (*drop out*).

Laporan Statistik Pendidikan BPS (2022a) APK Provinsi DKI Jakarta jenjang SMA/MA pada tahun 2022 sebesar 76,91 dan lebih rendah dari angka nasional 85,49 persen. Berbeda dengan Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat yang memiliki nilai APK lebih dari 95%. Data tersebut menjadi hal yang perlu ditelaah lebih mendalam. Hal ini dikarenakan problematika mengenai pemerataan akses pendidikan menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menaikkan persentase APK di berbagai provinsi

khususnya DKI Jakarta. Pemerataan akses pendidikan tidak hanya dilakukan di Indonesia. Hasil penelitian Dearden et al. (2005) menemukan bahwa di negara maju, seperti negara Inggris, bantuan dana yang diberikan pemerintah memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap partisipasi anak-anak ke sekolah. Sedangkan di negara Ghana, pendanaan pemerintah telah meningkatkan pendaftaran peserta didik di sekolah menengah atas negeri di Kotamadya Wa Municipality (Abdul-Rahaman et al., 2020). Studi yang dilakukan oleh Dearden et al. (2005) dan Abdul-Rahaman et al. (2020) menggambarkan bahwa pendanaan pendidikan yang diberikan pemerintah dapat mendorong peningkatan partisipasi peserta didik dalam mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah menjadi penting untuk terselenggaranya akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Di Indonesia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas melalui dana BOS. Dana BOS menjadi salah satu harapan bagi anak bangsa untuk dapat mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang layak. Hanya saja, pemerintah Indonesia masih memiliki tantangan besar untuk mendorong anak-anak melanjutkan pendidikan menengah. Tantangan tersebut bukan hanya dari aspek kemajuan teknologi tetapi juga sumber daya manusia dan manajemen pembiayaan pendidikan.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki 117 SMA Negeri. Semua sekolah tersebut mendapatkan dana BOS yang disalurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia secara langsung ke sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana BOS berpedoman pada Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, pada tahun 2023 ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022. Dalam pengelolaan dana BOS satuan pendidikan harus berpedoman pada prinsip : 1) fleksibilitas, yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana ; 2) efektif, yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan; 3) efisien, yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk

meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang; 4) akuntabel, yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) transparan, yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.

Prinsip-prinsip pengelolaan diatas harus dilaksanakan oleh tim pengelola dana BOS di sekolah, karena prinsip pengelolaan tersebut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Prapliyati dan Margunani (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi berpengaruh positif terhadap produktivitas sekolah. Menurut Nurlatifah dan Kurniady (2019) pengelolaan dana pendidikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap mutu pendidikan SMK di Bandung. Pengelolaan yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan SMK di Bandung terdiri dari perencanaan, pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas. Sehingga, pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan prinsip dan fungsi manajemen keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan data dari Dashboard SIAP BOP-BOS, besaran anggaran dana BOS yang direncanakan dan direalisasikan SMA Negeri di DKI Jakarta selama lima tahun terakhir tertuang pada Tabel 1.1. (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2018).

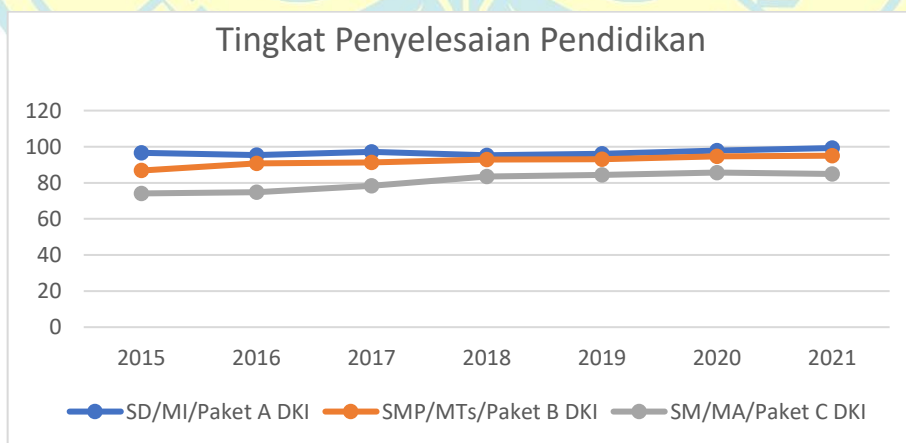
Tabel 1. 1 Berasan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Realisasi

| No | Tahun | RKAS | Realisasi | Serapan (%) |
|----|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2018 | 145.959.670.408 | 105.922.740.145 | 72,57 |
| 2 | 2019 | 163.275.118.640 | 126.669.219.353 | 77,58 |
| 3 | 2020 | 176.689.007.473 | 105.950.176.360 | 59,96 |
| 4 | 2021 | 229.746.166.872 | 160.888.597.640 | 70,03 |

| No | Tahun | RKAS | Realisasi | Serapan (%) |
|----|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| 5 | 2022 | 212.818.845.654 | 144.765.538.680 | 68,02 |

Dilihat dari Tabel 1.1, penggunaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta belum optimal. Hal ini dikarenakan ketersepan anggaran mengalami kenaikan dan penurunan. Sehingga, dianggap tidak ada ketidakstabilan penyerapan anggaran. Di tahun 2019, keterserapan anggaran mencapai 77,58%. Namun, di tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 17%. Kondisi tersebut terjadi kembali di tahun 2022. Di tahun 2022, keterserapan realisasi anggaran dana BOS mencapai 68,02%. Kemungkinan disebabkan adanya pandemi yang berakibat pada penutupan sekolah dan diganti dengan pembelajaran secara jarak jauh (Kemdikbud, 2020). Tetapi pada tahun 2018 dan 2019 serapan dana BOS juga tidak maksimal. Pengelolaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta dapat dikategorikan tidak efektif. Hal ini terlihat dari rencana kegiatan dan anggaran yang ada dalam sistem e RKAS tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disisi lain, kondisi yang ditunjukkan pada Grafik 1.1 berbeda dengan Grafik 1.2. DKI Jakarta merupakan salah satu ibukota di Indonesia yang mengalami kenaikan tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.



Grafik 1.2 Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan di DKI Jakarta

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar sangat tinggi, karena rata-rata dari tahun 2015 sampai tahun 2021 telah mencapai 90% lebih. Begitupula pada jenjang pendidikan menengah, tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di DKI Jakarta mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2021. Hal ini dapat dikatakan bahwa dana BOS memiliki peran dalam penyelesaian pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data tersebut didukung oleh studi Sulistyaningrum (2016) dan Sunardi (2017) yang mengidentifikasi bahwa dana BOS dapat meningkatkan performa peserta didik.

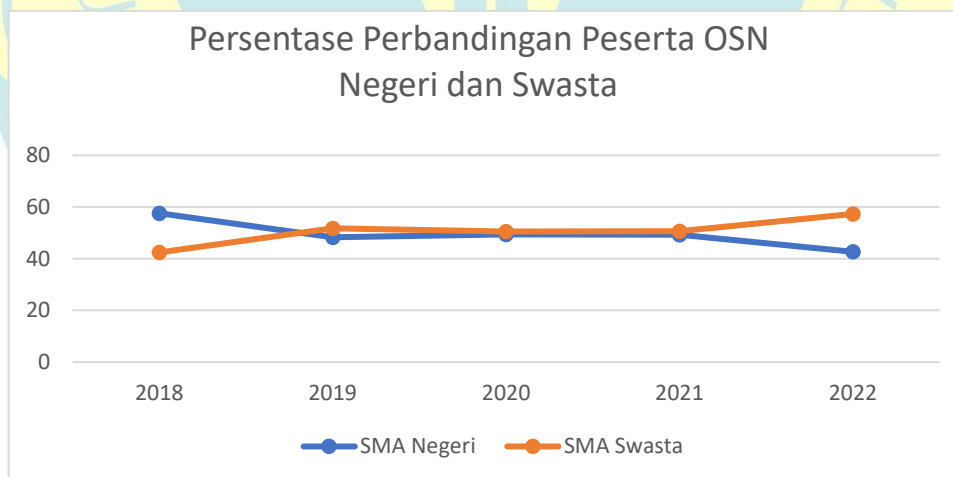
Selain bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, dana bantuan pemerintah (BOS) memiliki tujuan lainnya yaitu peningkatan mutu pembelajaran. Melalui mutu pembelajaran, akan berdampak pada prestasi peserta didik. Dana pemerintah dan donor mampu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan peralatan belajar mengajar yang berdampak pada prestasi akademik peserta didik (Nyakoe, 2020). Dana pemerintah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik siswa (Abdul-Rahaman et al., 2018). Penambahan dana bagi sekolah berkinerja kurang yang digunakan untuk menyediakan program akademik baru untuk peserta didik, dapat meningkatkan hasil akademis peserta didik (Sohn et al., 2022). Begitu pula dana BOS yang diberikan oleh pemerintah Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap prestasi belajar peserta didik (Bida, 2017). Salah satu bentuk prestasi peserta didik yang dapat dijadikan sebagai pedoman mutu pembelajaran adalah Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Pelaksanaan olimpiade berkelanjutan memberikan dampak pada proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan semua aspek kepribadian dan kemampuannya (Arlis et al., 2019). Grevtseva et al. (2018) mengatakan bahwa olimpiade sains merupakan sarana untuk meningkatkan kreativitas, mobilitas dan kemampuan intelektual peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian diatas, olimpiade sains menjadi salah satu tolak ukur mutu pembelajaran di satuan pendidikan, karena olimpiade sains mampu

meningkatkan kemampuan intelektual, kreativitas, dan kepribadian peserta didik.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, membuat ajang lomba untuk mencari peserta didik yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik. Salah satu lomba akademik yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Olimpiade Sains Nasional (OSN). Melalui OSN diharapkan dapat menghantarkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi bagian pemerataan prestasi, memaksimalkan potensi peserta didik yang memiliki talenta dan berkarakter, dan untuk meningkatkan mutu pendidikan (Pusprenas, 2022).

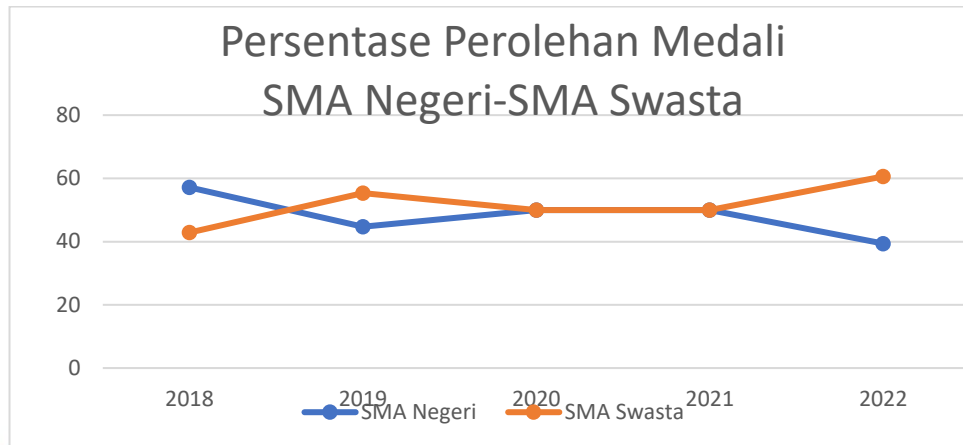
Olimpiade sains merupakan suatu ajang lomba berjenjang, yang di mulai dari tingkat Kabupaten/Kota. Peserta OSN yang memenuhi syarat nilai tes, dapat mengikuti OSN ke tingkat Provinsi. Melalui seleksi tingkat provinsi, terpilih beberapa peserta didik yang akan mengikuti seleksi atau lomba pada tingkat Nasional. Peserta OSN ini terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Presentase perbandingan peserta OSN SMA Negeri dan SMA Swasta Provinsi DKI Jakarta pada tingkat nasional terlihat pada Grafik 1.3.



Grafik 1.3 Perbandingan Persentase peserta OSN Tingkat Nasional antara SMA Negeri dan SMA Swasta

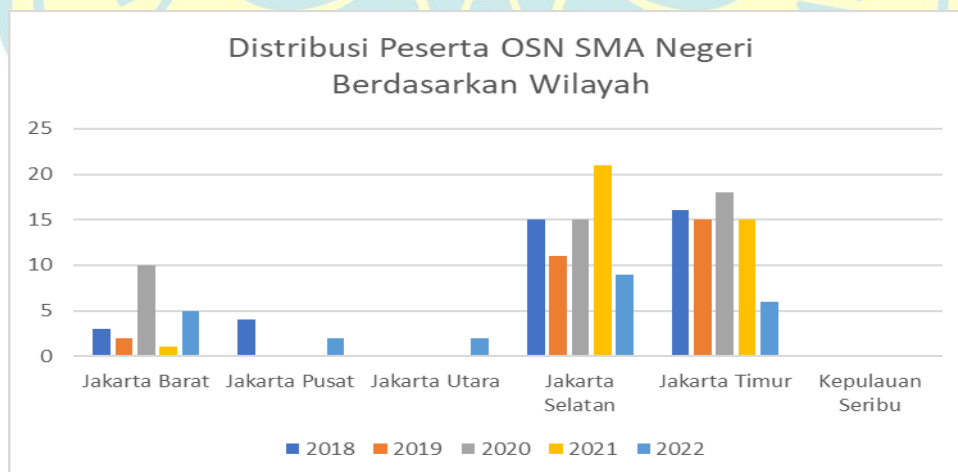
Grafik 1.3, memperlihatkan bahwa peserta OSN SMA swasta lebih banyak dibandingkan peserta OSN yang berasal dari SMA negeri. Hal ini menunjukkan bahwa peserta OSN SMA negeri, banyak yang tereliminasi

pada pelaksanaan tingkat provinsi atau bahkan di tingkat kabupaten/Kota. Sedangkan perbandingan persentase perolehan medali antara SMA negeri dan swasta ditunjukkan pada Grafik 1.4.



Grafik 1.4 Perbandingan Persentase Perolehan Medali OSN Tingkat Nasional jenjang SMA/MA

Data diatas menunjukkan bahwa dalam perolehan medali SMA swasta lebih banyak dibandingkan perolehan medali SMA Negeri, walaupun di tahun 2018, SMA negeri mendapatkan medali lebih banyak dari swasta. tetapi pada tahun 2019 dan 2022, SMA swasta mendominasi perolehan medali OSN SMA tingkat nasional. Distribusi peserta OSN SMA Negeri berdasarkan wilayah, terlihat pada Grafik 1.5.



Grafik 1.5 Distribusi peserta OSN di wilayah kota administrasi

Berdasarkan data distribusi peserta OSN SMA negeri pada masing-masing wilayah terlihat tidak terdistribusi secara merata. Peserta didik dari

SMA negeri yang mengikuti OSN pada tingkat nasional, terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa, mutu pendidikan di kedua wilayah tersebut lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, untuk wilayah Jakarta Utara, peserta didik dari SMA negeri, baru ada perwakilan pada tahun 2022, begitu pula wilayah Jakarta Pusat perwakilan peserta didiknya hanya di tahun 2018 dan 2022. Oleh karena itu, SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta harus berusaha lebih baik agar mampu menambah porsi sebagai peserta OSN tingkat Nasional dan menambah perolehan medalnya. Berdasarkan data realisasi penggunaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta yang masih rendah, sangat dimungkinkan SMA Negeri di DKI Jakarta dapat meningkatkan prestasi peserta didik pada ajang OSN melalui efektivitas pengelolaan dana BOS.

SMA Negeri di DKI Jakarta dalam mengelola dana BOS tahun 2023, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Berdasarkan hasil *Forum Group Discussion* (FGD) dengan kepala SMA Negeri di DKI Jakarta, Fakta yang terlihat di sekolah, sarana penunjang dalam proses pembelajaran masih belum terpenuhi secara maksimal, seperti perpustakaan di sekolah belum sesuai dengan standar. Buku-buku penunjang atau buku-buku literasi yang dimiliki perpustakaan sekolah masih minim dan belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Selain itu, alat-alat untuk praktek cenderung tidak ada peningkatan yang berarti. Alat-alat yang ada di sekolah rata-rata merupakan alat yang sudah lama dibeli atau di kirim dari Dinas Pendidikan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan serapan dana BOS SMA Negeri DKI Jakarta. Di satu sisi, dana BOS tidak terserap secara maksimal, sementara kebutuhan di sekolah juga tidak tersedia secara maksimal. Pengelolaan dana BOS SMA Negeri DKI Jakarta, telah didukung dengan aplikasi dalam perencanaan yang menggunakan sistem e-RKAS dan pembayaran menggunakan aplikasi Siap BOS/BOP, sehingga

memberikan kemudahan dalam pengelolaan dana BOS. Fakta yang terjadi, serapan dana BOS SMA Negeri DKI Jakarta selama lima tahun terakhir rata-rata 69,64%. Hal ini bertentangan dengan pendapat Kirmani, Wani, dan Saif (2015) yang menyatakan bahwa teknologi informasi komputer, telah meningkatkan efisiensi, keandalan, efektivitas, kinerja, meningkatkan struktur keuangan secara kualitas dan kuantitas. Purwanto (2018) mengatakan bahwa penggunaan sistem informasi memiliki dampak bagi pengendalian internal, transaksi berjalan efektif dan efisien, dan meningkatkan kepatuhan pada hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu untuk dilakukan evaluasi secara mendalam terhadap implementasi pengelolaan dana BOS SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mencari akar masalah tidak maksimalnya penggunaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta dan efektivitasnya, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Akar masalah ini menjadi penting untuk dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta. Selain itu, Masrurroh dan Fitriani (2021) menilai bahwa kesenjangan dalam sosialisasi program dana BOS dan hambatan-hambatannya yaitu komunikasi yang kurang efektif, tim BOS tidak memahami tugas dan fungsinya, tim BOS tidak memahami Juknis BOS, masih terdapat 3 komponen realisasi yang tidak sesuai dengan juknis BOS, dan dana pelaksanaan kegiatan BOS dilakukan secara spontanitas karena tidak memiliki perencanaan. Masalah-masalah yang muncul tersebut dapat mengganggu kegiatan pembelajaran yang berdampak pada mutu pembelajaran di sekolah.

Anggraini & Mayarni (2013) memberikan penjelasan terkait evaluasi program BOS dalam peningkatan sarana pendidikan. Hasil evaluasinya disampaikan bahwa dalam pengelolaan dana BOS masih banyak masalah yang disebabkan oleh faktor organisasi, seperti kurangnya koordinasi yang baik antara pihak sekolah dengan komite sekolah sebagai pengawas yang tidak berjalan dengan baik. Dari faktor pelaksana, Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah belum memahami tujuan dan pengelolaan dana BOS, kegiatan belanja tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran sekolah

(RKAS), dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak berjalan dengan benar. B. Kafomay (2020) menyoroti tentang pencairan dana BOS yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan sekolah. Mulya (2019) menyatakan bahwa kendala dalam implemementasi dana BOS di SMA Negeri 1 Kadipaten adalah terlambatnya pencairan dana BOS dan pelaksanaan pembayaran melalui tranasfer non tunai. Selain itu, Setyoningsih dan Ismanto (2021) melakukan evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Kristen BM Salatiga. Hasil evaluasinya masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan dan standar BOS di SMK Kristen BM Salatiga. Kesenjangan tersebut antara lain: (1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah belum optimal, sehingga masih terdapat kebutuhan sekolah yang tidak ada dalam RKAS. (2) Keterlambatan pencairan dana BOS, (3) Dana BOS belum mampu membiayai tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, ditemukan berbagai masalah dalam proses pelaksanaan program dana BOS, sehingga dibutuhkan evaluasi terhadap implemementasi program tersebut.

Hasil data FGD yang dilakukan oleh penulis dan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan urgensi terhadap pentingnya melakukan evaluasi program dana BOS. Evaluasi Program sangat penting untuk dilakukan, karena dengan adanya evaluasi, suatu program dapat diukur tingkat keberhasilannya. OECD (2013) menyampaikan bahwa pembuat kebijakan dan perancang program memerlukan bukti melalui evaluasi untuk memastikan bahwa suatu program berjalan secara efektif, untuk mengidentifikasi wilayah perbaikan, dan untuk memeriksa bahwa inisiatif memanfaatkan sumber daya dengan baik. Menurut Arikunto dan Jabar (2009), evaluasi hakikatnya adalah suatu cara untuk menilai keberhasilan dari suatu program yang telah dilaksanakan. Frye dan Hemmer (2012) mengatakan bahwa evaluasi program merupakan proses identifikasi sumber variasi hasil program dari dalam maupun luar program, sambil menentukan apakah sumber variasi ini atau bahkan hasil itu sendiri diinginkan atau tidak diinginkan. Penjelasan diatas memberikan penguatan untuk alasan mengapa

implementasi pengelolaan dana BOS harus dievaluasi. Dengan adanya penelitian evaluasi program yang dilakukan ini akan memberikan kejelasan untuk pengembangan program dana BOS selanjutnya.

Penelitian evaluasi ini akan dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP yang diperkenalkan oleh Stufflebeam. Di mana dijelaskan bahwa model CIPP menurut Stufflebeam dan Coryn (2014) *defines that CIPP model is a comprehensive framework for conducting formative and summative evaluations of programs, projects, personnel, products, organizations, policies, and evaluation.* Model evaluasi ini dimulai dari tahap konteks (landasan program, tujuan, dan sasaran), masukan (perencanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi informasi), proses (proses penerimaan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan), sampai dengan produk (peningkatan mutu pembelajaran dilihat dari prestasi akademik dan non akademik) mengenai implementasi pengelolaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta.

Evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta melalui pembuatan desain model pengelolaan dana BOS, sehingga tercapainya tujuan program dana BOS yaitu peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi implemetasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan subfokus sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran program pengelolaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta.
2. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah, sumber daya manusia (Tim BOS), sumber daya teknologi informasi, dan sumber daya keuangan dalam pengelolaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta.
3. Pelaksanaan dana BOS mulai dari proses penerimaan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan di SMA Negeri DKI Jakarta

4. Hasil pengelolaan dana BOS berdasarkan prestasi akademik dan non akademik di SMA Negeri DKI Jakarta.
5. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi implementasi pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan (BOS) yang sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan dan rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketercapaian tujuan dan sasaran program dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta?
2. Bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah, keterlibatan sumber daya manusia (Tim BOS), pemanfaatan sumber daya teknologi informasi, dan ketersediaan sumber daya keuangan dalam implementasi pengelolaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta?
3. Bagaimana proses penerimaan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan implementasi pengelolaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta?
4. Bagaimana hasil implementasi pengelolaan dana BOS berdasarkan prestasi akademik dan non akademik SMA Negeri di DKI Jakarta?
5. Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari implementasi pengelolaan dana BOS SMA Negeri di DKI Jakarta?

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini akan menjadi bagian dari proses dalam;
 - a) mengembangkan suatu konsep baru dalam bidang keilmuan evaluasi program pendidikan;
 - b) menambah wawasan dalam bidang keilmuan manajemen mutu keuangan di satuan pendidikan;
 - c) menambah wawasan dalam bidang keilmuan manajemen pendidikan.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk;
 - a) mewujudkan suatu model evaluasi implementasi pengelolaan dana BOS

yang bermanfaat bagi satuan pendidikan; b) meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan; c) menjadi bahan rujukan untuk pengembangan penelitian berikutnya.

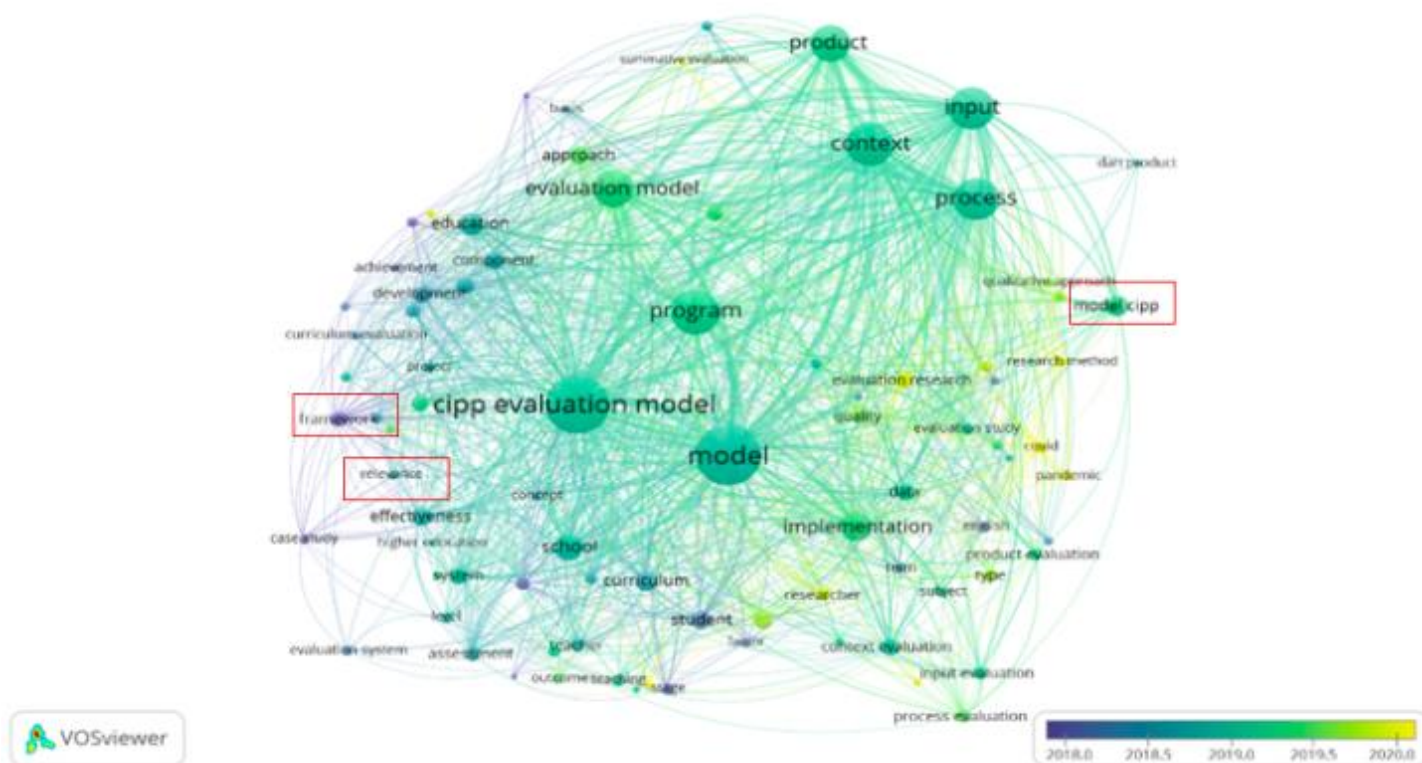
1.5 Kebaruan Penelitian (State of the Art)

Bedasarkan hasil pencarian dengan menggunakan aplikasi *VOSviewer*, dapat terlihat *resume point* beberapa penelitian terdahulu, dengan jumlah jurnal sebanyak 919 jurnal terindeks Scopus dan *Google Scholar* dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 1. 2 Jumlah Jurnal terkelola dalam aplikasi VOSviewer

| Tahun | Jumlah Artikel |
|-------|----------------|
| 2022 | 38 artikel |
| 2021 | 219 artikel |
| 2020 | 175 artikel |
| 2019 | 146 artikel |
| 2018 | 124 artikel |
| 2017 | 97 artikel |
| 2016 | 65 artikel |
| 2015 | 55 artikel |

Hasil pengolahan dari aplikasi *Vosviewer* terlihat pada gambar berikut



Gambar 1. 1 Pengolahan VOS Viewer

Berdasarkan pengolahan melalui aplikasi VosViewer, terlihat pada gambar 1, terdapat peluang penelitian untuk menunjang efektivitas penggunaan dana BOS, ditemukan peluang penelitian yang teridentifikasi adalah; *framework*, *effectiveness*, dan *model CIPP*.

Kebaharuan penelitian (novelty) merupakan salah satu aspek yang harus disampaikan pada penelitian yang dilakukan karena kebaruan menjadi pembeda (gap) dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang efektivitas penggunaan dana BOS telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu: Citariani, Ariawan dan Weran (2023) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi melalui model evaluasi CIPP dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan penggunaan dana BOS di SMA Swasta Kristen Harapan Denpasar pada masa pandemic Covid-19. Hasil penelitian evaluasi ini menunjukkan bahwa pada aspek *context* 50% dana BOS belum sepenuhnya digunakan sebagai pembayaran honor sehingga kurang efektif penggunaannya. Begitupula pada komponen *input* dimana

sekolah belum memiliki fasilitas penunjang dalam melakukan pengelolaan dana BOS. Pada komponen *process* dikatakan efektif penggunaannya karena tim pengelola dana BOS dapat menunjukkan laporan data keuangan. Sedangkan komponen *product* kurang efektif karena belum mampu memotivasi guru dan siswa mengikuti perlombaan pada masa pandemic Covid-19.

Sudarna, Agung dan Natajaya (2022) dengan judul efektivitas pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah reguler (BOS reguler) di SMAN Bali Mandara Singaraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler) di SMAN Bali Mandara ditinjau dari model CIPP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program dana BOS di SMAN tersebut dinyatakan efektif. Meskipun begitu, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat dimensi yang bernilai negatif sebagai berikut: (1) pada variable input, dua variable yaitu sumber daya manusia dan petunjuk teknis pelaksanaan BOS reguler mengalami kendala. Beberapa guru tidak memiliki pemahaman terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan program BOS reguler; dan (2) variable proses memiliki dua dimensi yang terkendala yaitu pemanfaatan dana dan pertanggungjawaban keuangan. Kendala pemanfaatan dana BOS reguler ini sering berubah di pertengahan jalan. Sehingga, hal tersebut berdampak pada pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS reguler yang dilakukan secara online.

Ceni, Agung dan Yudana(2014) dengan judul efektivitas program BOS SMA di SMA Negeri Kabupaten Karangasem dalam Rangka Mendukung Pendidikan Menengah Universal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BOS SMA di SMA Negeri Kabupaten Karangasem dalam rangka mendukung Pendidikan menengah universitas melalui studi evaluasi komponen CIPP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi konteks, sekolah perlu untuk melakukan sosialisasi program dana BOS lebih intensif. Pada aspek input, sosialisasi dan pelatihan belum memberikan kontribusi untuk mendukung keberhasilan program BOS SMA. Sehingga, pada aspek proses hanya dikatakan cukup efektif. Sedangkan aspek produk.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan program dan hasil yang diinginkan belum sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan siswa tamatan SMP/MTs yang tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA masih cukup tinggi sekitar 30%.

Kebaruan dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdiri dari: a) pada variabel input, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak terlihat apakah menggunakan sistem aplikasi atau manual, b) variabel proses, pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual, yaitu berhubungan secara langsung dengan penyedia, pembayaran belanja tidak terlihat dengan sistem transfer atau bayar *cash*, dan sistem pengawasannya tidak dijelaskan dilakukan oleh pihak internal atau eksternal sekolah.

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: a) lokasi penelitian yaitu, SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta, b) variabel input, RKAS SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem aplikasi (e-RKAS) dan sistem ARKAS, c) variabel proses, pengadaan barang/jasa menggunakan *e marketplace* (SIPLAH), pembayaran barang/jasa menggunakan sistem aplikasi (SIAP-BOP/BOS) dengan sistem transfer antar Bank, dan pengawasannya difokuskan pada pengawasan pihak internal sekolah, dan e) membuat desain model pengelolaan dana BOS.